

**Judul** : Punya dokumen migran masih bisa jadi target TPPO  
**Tanggal** : Kamis, 28 Mei 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

## Punya Dokumen Legal Pekerja Migran Masih Bisa Jadi Target TPPO



**Maruli Siahaan**

SENAYAN melihat modus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) makin kompleks. Banyak korban yang diberangkatkan lewat jalur resmi dan legal. Namun, tujuan keberangkatan hingga dokumen mereka dimanipulasi hingga terjerat eksploitasi di negara tujuan.

Anggota Komisi XIII DPR Maruli Siahaan mengatakan, pengawasan pemberangkatan pekerja migran perlu diperketat. Otoritas tidak bisa lagi hanya mengandalkan pemeriksaan administratif biasa. Sebab banyak korban TPPO berangkat dengan dokumen lengkap, tapi tetap masuk dalam skema perdagangan orang.

Maruli mendorong Ditjen Imigrasi membangun sistem identifikasi efektif bagi calon yang berisiko TPPO. Sejumlah indikator harus diperhatikan. "Mulai dari usia produktif 18-35 tahun, tujuan negara, pembelian tiket mendadak, ketiadaan kontrak kerja, hingga visa wisata yang diduga dipakai untuk bekerja," terangnya, Rabu (27/5/2026).

Maruli menjelaskan, pola itu selalu berulang dalam berbagai kasus perdagangan orang yang menjerat WNI. Karena itu, petugas khusus anti-TPPO harus ditempatkan di titik keberangkatan internasional utama di Tanah Air. Seperti Soekarno-Hatta, Kuala Namu, Batam, Surabaya, Entikong, dan Nunukan, termasuk

di bandara dekat jalur perbatasan.

Petugas itu tidak cukup hanya memeriksa dokumen. Mereka juga harus melakukan wawancara singkat kepada penumpang berkategori risiko tinggi, guna memastikan tujuan keberangkatan aman dan sesuai prosedur. "Dalam banyak kasus TPPO, jaringan semacam ini tak mungkin berjalan tanpa kebocoran sistem yang serius," jelasnya.

Maruli juga mendorong Ditjen Imigrasi memiliki daftar negara tujuan merah dengan pengawasan lebih ketat terhadap keberangkatan WNI. Wilayah yang dinilai rawan antara lain Myanmar, Laos, Kamboja, Thailand yang kerap jadi jalur transit ilegal, serta sejumlah wilayah tertentu di Timur Tengah dan sekitarnya.

Dia mengusulkan syarat tambahan berupa tiket kembali ke Indonesia pada keberangkatan tertentu yang terindikasi rawan penyalahgunaan visa atau keberangkatan nonprosedural. "Pencegahan TPPO harus berjalan terpadu lewat penguatan pengawasan keimigrasian, perlindungan HAM, pendampingan korban, dan koordinasi lintas lembaga secara konsisten," katanya.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira menambahkan, TPPO bukan lagi sekadar kasus kriminal biasa. Fenomena ini sudah sangat serius dan mengancam keselamatan anak bangsa. Bahkan, situasi ini menunjukkan persoalan TPPO telah berada pada level darurat yang memerlukan langkah besar dari Pemerintah.

Dia menegaskan, negara harus melihat TPPO sebagai bentuk perbudakan modern yang nyata, yakni eksploitasi manusia terhadap manusia demi keuntungan. "Saat ini seharusnya tidak lagi melihat TPPO kasus per kasus, melainkan fenomena yang terus berkembang di Indonesia dan terjadi di banyak sektor," ungkapnya. ■ PVB